

KEGIATAN DPR-RI AWAL DESEMBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat Paripurna DPR-RI, Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus, Baleg dalam pembahasan RUU dan Penetapan Pejabat Publik. Berikut ringkasan singkat kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR-RI untuk minggu pertama Desember 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Rapat Paripurna Selasa, 6 Desember 2011 telah mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) CTBT. Sebelumnya, Rapat Kerja dengan Pemerintah juga telah dilakukan pada tanggal 30 November 2011, dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat I. Pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I berlangsung kritis, mendalam, dan terbuka. Pada laporan Ketua Komisi I kepada Sidang Paripurna dikatakan bahwa, diratifikasinya CTBT ini akan memperkuat *standing dan credentials* Indonesia sebagai negara yang senantiasa mendukung dan berkomitmen terhadap non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir, serta dapat memperkuat posisi Indonesia untuk ikut mendesak negara-negara lain dalam mempercepat ratifikasi CTBT.

Mengiringi ratifikasi terhadap *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* ini, Komisi I DPR RI memberikan beberapa pandangan: [1] ratifikasi dan pemberlakuan traktat ini harus tetap menjamin upaya dan akses Indonesia untuk mengambil manfaat dari penelitian, pengembangan, dan penggunaan energi nuklir secara damai. Begitu pula dengan pemanfaatan sistem fasilitas jaringan *auxiliary seismic station* untuk pemantauan uji ledak nuklir serta sistem peringatan dini terhadap kemungkinan gempa bumi dan tsunami; [2] langkah Pemerintah Indonesia yang meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-Coba Senjata Nuklir harus dimaksudkan seb-



agai langkah strategis dan berkelanjutan untuk menghilangkan senjata nuklir secara bertahap sekaligus sebagai *total elimination of nuclear weapons*; [3] dengan meratifikasi CTBT ini, maka Indonesia telah memberikan sinyal yang jelas dan konkrit kepada dunia internasional, sekaligus menagih keseriusan komitmen dari negara-negara nuklir dibawah kerangka *Treaty of The Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* untuk bergerak menuju perlucutan senjata nuklir. Dengan demikian, Indonesia telah ikut mencegah upaya suatu negara untuk menjadi negara nuklir baru tanpa melanggar norma-norma hukum, serta mencegah pengembangan dan pemajuan kualitatif jenis senjata nuklir baru (*new type of nuclear weapons*); dan [4] agar ratifikasi Traktat ini menjadi bagian dari rencana konkrit dari dunia internasional untuk melakukan perlucutan senjata nuklir yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang bebas nuklir.

Pendapat akhir Pemerintah atas RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) CTBT antara lain: [1] pengesahan ini mempertegas Indonesia sebagai negara yang senantiasa mendukung dan berkomitmen terhadap *non-proliferasi* dan penghapusan total senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir; [2] dunia yang bebas senjata nuklir akan berdampak langsung terhadap upaya penciptaan perdamaian dunia sesuai semangat UUD 1945; [3] Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan senjata nuklir yang harus dilakukan tanpa

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

syarat, mengikat secara hukum, non-diskriminatif, dan tanpa penggunaan standar ganda yang berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali; [4] keberadaan senjata nuklir yang salah satu elemen pentingnya adalah uji nuklir melalui metoda peledakan, mengancam perdamaian dunia, dimana resiko pecahnya perang nuklir tetap menjadi keprihatinan internasional; [5] komitmen Indonesia terhadap CTBT merupakan kenistayaan mengingat diawal tahun 1990-an, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara pelopor upaya untuk mewujudkan sebuah instrumen internasional yang mengatur pelarangan menyeluruh uji coba peledakan senjata nuklir, yang merupakan embrio bagi kelahiran CTBT; dan [6] sepanjang tahun 2011 ini, kepemimpinan Indonesia melalui keputusan untuk menggulirkan proses ratifikasi CTBT memperoleh sambutan dan dukungan masyarakat internasional.

Dalam Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ini hadir pula Pejabat CTBTO H.E Ambassador Tibor Toth, Executive Secretary CTBTO dan beberapa pejabat kehormatan dari CTBTO.

PENETAPAN PEJABAT PUBLIK

Rapat Paripurna Selasa, 6 Desember 2011, DPR RI telah **memberikan persetujuan** atas pejabat-pejabat publik yang di perintahkan oleh Undang-Undang. Pejabat-pejabat dimaksud yaitu *pertama*, Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Periode 2011-2016, untuk hal itu Komisi I telah melakukan

Uji Kepatutan dan kelayakan terhadap para calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) periode 2011-2016. Komisi I memutuskan Menetapkan 5 orang calon anggota Dewas LPP-TVRI periode 2011-2016 menduduki anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan nama-nama yaitu: Dra. Immas Sunarya, MM (Unsur TVRI), Elprisdad (Unsur Masyarakat), Indrawadi Tamim, PhD (Unsur Pemerintah), Bambang Soeprijanto (Unsur Pemerintah), Akhmad Sofyan S. Sos (Unsur TVRI). Tugas Dewan Pengawas LPP-TVRI bertugas menyusun kebijakan dan strategi pengembangan TVRI serta pengangkatan Dewan Direksi.

Kedua, penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR-RI sesuai dengan penugasan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR-RI telah melakukan pemilihan calon Pimpinan KPK melalui uji kelayakan dan kepatutan dari nama-nama calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2011-2015. Empat nama telah dipilih berdasarkan hasil pemungutan suara dari 8 calon yaitu: (1) Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., (2) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H, (3) Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., L.LM, (4) Zulkarnain, S.H.,M.H. Selanjutnya telah dilakukan pemilihan dan penetapan 1 (satu) orang dari 5 (lima) calon Pimpinan KPK sebagai Calon Ketua KPK. Sesuai Keputusan dalam Rapat Komisi, Komisi III DPR-RI memilih dan menetapkan Ketua KPK didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon. Adapun hasil pemungutan suara terhadap 5 (lima) nama Calon Ketua KPK, sebagai berikut:

No	Calon Ketua KPK	Jumlah Suara
1.	Dr. Abraham Samad, S.H., M.H.	43
2.	Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H	4
3.	Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N. L.LM	1
4.	Zulkarnain, S.H.,M.H.	3
5.	Dr. M. Busjro Muqoddas	5



Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, Komisi III DPR-RI memilih dan menetapkan DR. Abraham Samad S.H.,M.H. sebagai Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil Raker Komisi III ini telah disahkan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 7 Desember 2011.

FUNSI ANGGARAN

Telah dilakukan rapat kerja Komisi-komis DPRI RI dengan Pemerintah/Pasangan kerja masing masing dengan agenda: “Evaluasi Pelaksanaan APBN 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2011”.



FUNGSI PENGAWAN

Komisi-komisi DPR telah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Dengan Pemerintah berkaitan dengan isu yang berkembang dan tindak lanjut dari Kunjungan Kerja Komis-Komisi DPR ke daerah.

Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama, dengan agenda “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2011 M dan Beberapa Antisipasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Jemaah Haji, serta Tanggapan dan Laporan Hasil Pengawasan Komis VIII DPR RI”. Disimpulkan antara lain: [1] Komisi VIII dan Menteri Agama sepakat bahwa masing-masing akan melakukan pendalaman terhadap laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1432 H/2011 M, dan akan dilanjutkan dalam pertemuan selanjutnya; [2] Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan pelayanan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M secara menyeluruh.

KEGIATAN LAIN

Dalam rangka peringatan hari AIDS sedunia, maka Partai Demokrat telah menyelenggarakan Pameran dan *Talk-*

show Penanggulangan AIV/AIDS dalam Multi-Perspektif. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dan didukung oleh *United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) HIV Programme Indonesia*. Ketua DPR dalam sambutannya mengatakan, bahwa langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dalam menangani masalah HIV/AIDS, yang harus kita perhatikan antara lain; [1] perluasan jaringan fasilitas pelayanan bagi penderita HIV/AIDS; [2] Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS; [3] Perbaikan koordinasi dan tata kelola dari semua pihak dan instansi yang ikut menangani masalah HIV/AIDS di tanah air; [4] Perbaikan sistem informasi; [5] Dan yang sangat penting, mobilisasi dana, baik dari luar maupun dalam negeri, untuk membiayai peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan HIV/AIDS di tanah air. Ketua DPR-RI berharap, jangan ada hukuman sosial atau stigma bagi penderita HIV/AIDS, yang sesungguhnya terasa lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Tindakan pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang diduga terinfeksi HIV, tidak perlu dilakukan. Masyarakat dan kita semua justru harus melindungi mereka, memberikan informasi yang benar, agar selanjutnya penderita bisa ditangani dengan baik.*

Priyo Minta Pimpinan KPK yang Baru Segera Unjuk Gigi

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan empat Pimpinan KPK yang terpilih lewat uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi Hukum.

Selain itu paripurna juga menyetujui Abraham Samad sebagai Ketua KPK yang baru serta empat orang wakil ketua, termasuk Busyro Muqoddas yang melanjutkan masa kerjanya tiga tahun kedepan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

“Kita bersama-sama menginginkan komisi yang menangani pemberantasan korupsi dengan kewenangan besar yang kita berikan, bahkan sangat besar, powerful. Kita doakan semoga pimpinan KPK berlima secara bersama-sama, kolektif dan gotong royong bisa memprakarsai dan segera unjuk gigi sebagai lembaga yang paling terdepan dalam memberantas korupsi,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dalam pidatonya selaku pimpinan rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/11).

Secara khusus Priyo juga mengucapkan terima kasih kepada empat calon pimpinan KPK yaitu Ariyanto Sutadi, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat dan Yunus Husein yang telah mengikuti proses fit and proper test namun tidak terpilih. “Kita tahu semua reputasinya tapi apapun Komisi III harus menjatuhkan pilihan atas nama konstitusi. Dengan hormat atas nama pimpinan dan anggota DPR kami mengucapkan terima kasih atas segala ikhtiarnya,” jelasnya dan disambut tepuk tangan anggota DPR yang mengikuti sidang.

Sementara itu dalam laporannya dihadapan peserta rapat paripurna Ketua Komisi III Benny K. Harman meminta maaf kepada berbagai kalangan, kelompok masyarakat yang telah mendukung calonnya namun ternyata tidak terpilih. “8 orang yang diajukan presiden adalah orang-orang pilihan yang dianggap mampu untuk duduk sebagai pimpinan KPK. Tapi tidak mungkin semuanya terpilih,”



Wakil Ketua DPR Proyo Budi Santoso (tengah) saat berfoto bersama empat Pimpinan KPK terpilih pungkasnya. Ia berharap pimpinan yang baru mampu meningkatkan citra dan wibawa KPK sebagai lembaga negara utama dalam pemberantasan korupsi di negara ini.

Anggota Komisi III dari FPD, Ruhut Sitompul saat menyampaikan interupsinya dalam sidang paripurna meminta pimpinan KPK terpilih tegas bersikap dan tidak segan menindak bahkan anggota DPR yang telah memilihnya. “Sahabat kami pimpinan KPK marilah kita bekerjasama saling hormat menghormati. Walaupun empat orang saudara disana kami yang memilih, tetapi apabila ada fakta bukti hukum berkaitan dengan korupsi jangan segan-segan borgol kami,” tegasnya.

Empat orang pimpinan KPK terpilih yang hadir dalam rapat paripurna terlihat memberikan anggukan. Priyo juga mempersilahkan Abraham Samad, Bambang Widjoyanto, Zulkarnaen dan

saat berfoto bersama empat Pimpinan KPK terpilih Adnan Pandu Praja untuk tampil di depan meja pimpinan. Setelah mendapat ucapan selamat, seluruh pimpinan KPK terpilih terlihat memberikan salam hormat kepada seluruh anggota DPR peserta sidang. Salam ini kembali disambut tepuk tangan.

Kepada wartawan usai sidang Ketua KPK terpilih Abraham Samad menyampaikan komitmennya untuk tetap membawa KPK kritis terhadap DPR. “Kita siap bekerjasama dengan DPR dan mudah-mudahan bisa lebih kritis,” pungkasnya. Ia menegaskan KPK tak akan pandang bulu menuntaskan kasus korupsi termasuk yang menyangkut anggota DPR. “Jadi semua kasus yang memenuhi alat bukti yang cukup kita sidik. Kita tidak bicara orang tapi kita bicara alat bukti,” tutur Abraham yang akan bertugas memimpin KPK pada periode 2011-2015 nanti. (iky)/foto:iw/parle.

Satu Mobil Perpustakaan Keliling untuk Deli Serdang

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 akan mendapatkan satu unit mobil Perpustakaan Keliling untuk mengatasi kurangnya perpustakaan desa di wilayah tersebut.



Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling yang diberikan untuk Kabupaten Deli Serdang



Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan prov. Sumut Syaiful Syafri, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Prov. Sumut Nurdin Pane, Camat Percut Sei Tuan Darwin

Zein, serta pengurus Perpustakaan Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut (2/12).

Ketua Tim Komisi X DPR RI H. Asman Abnur pada kesempatan tersebut mengatakan, Komisi X akan mendorong pengadaan satu unit mobil Perpustakaan Keliling untuk wilayah kecamatan Percut Sei Tuan. "Satu unit mobil dan penambahan koleksi buku untuk kecamatan ini," ucap Asman. "Kita akan mengawalinya," tegas Ketua Tim.

Ibrahim Sakti Batubara (F-PAN), Anggota Tim Komisi X DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara mengatakan, menurut UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan pembinaan perpustakaan daerah ada di daerah, pemerintah pusat hanya berwenang pada koordinasi. "Kita akan terus mendukung terutama apa yang menjadi kewenangan pusat seperti bantuan untuk perpustakaan dan pengadaan buku," ucapnya.

Ibrahim menambahkan, kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan terbesar di luar pulau Jawa. Dari 20 kecamatan di Kab. Deli Serdang baru satu yang memiliki perpustakaan desa. "Pada tahun 2012 kita anggaran untuk pengadaan perpustakaan di setiap kecamatan dan satu unit mobil perpustakaan keliling," ungkapnya. Saat ini untuk Kab. Deli Serdang sudah ada 1 unit mobil perpustakaan keliling.

Anggota Tim Komisi X DPR, Theresa EE. Pardede (F-PD) mengatakan hakekat perpustakaan adalah ilmu itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, perlu dibuka seluas-luasnya kesempatan untuk mendapatkan ilmu melalui perpustakaan. Tere menambahkan, kultur masyarakat kita lebih banyak mendengar. "Perlu dirubah paradigma masyarakat kita, dengan membiasakan membaca misalnya melalui lomba membaca dongeng di kalangan anak-anak," katanya mengusulkan.

Camat Percut Sei Tuan Darwin Zein mengungkapkan salah satu persoalan di wilayahnya adalah kurangnya lahan untuk pembangunan sekolah SMK dan SMA, kerena sebagian besar tanah di kecamatan ini dikuasai perusahaan perkebunan besar. "Tolong kami Pak untuk mendapatkan lahan," ucap Darwin memohon.

Menanggapi permintaan camat Darwin Zein, Ketua Tim Komisi X, H. Asman Abnur mengatakan Komisi X akan berkoordinasi dengan Komisi II, karena persoalan pertanahan adalah wewenang Komisi II. "Kita punya anggaran untuk membangun lapangan sepak bola, ketika anggaran turun tanahnya tidak ada, hal seperti ini sering kita hadapi," ungkap Asman Abnur. "Persoalan ini perlu dicari solusinya," ucap Ketua Tim Komisi X mengakhiri sambutannya. (Rn.Tvp) foto:Rn

Italia Tawarkan Kerjasama Energi Terbarukan

Kunjungan delegasi Italia ke Indonesia kali ini adalah ingin menawarkan kerjasama dalam bidang energi terbarukan. Tujuan utama delegasi Italia dalam kunjungan kali ini ke Indonesia adalah untuk mendapatkan kerjasama langsung dengan pengusaha kelapa sawit.



Delegasi Italia atau Ketua Asosiasi Persahabatan dan Kerjasama Indonesia-Italia, Di Biaggio (kiri)

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Ketua Asosiasi Persahabatan & Kerjasama Indonesia-Italia, Di Biaggio saat pertemuan dengan Anggota Grup Kerjasama Antar Parlemen (GKSB) Indonesia-Italia yang dipimpin oleh Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN) dan didampingi Atte Sugandi (F-PD), Fardan Fauzan (F-PD), Alimin Abdullah (F-PAN), Sigit Sosiantomo (F-PKS) dan Lucy Kurniasari (F-PD) di Ruang pertemuan BKSAP, Gedung Nusantara, Rabu (30/11).

“Negara kami telah berkomitmen untuk tidak menggunakan nuklir sebagai energi pembangkit tenaga listrik tetapi dengan menggunakan energi alternatif lainnya, yang salah satunya adalah kelapa sawit,” jelas Di Biaggio.

Indonesia selama ini merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia yang memiliki luas areal dan produksi kelapa sawit berdasarkan publikasi dari data statis-

tik Ditjen Perkebunan adalah seluas 8,04 juta ha dengan produksi 19,76 juta ton CPO pada tahun 2010 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga tidak jarang negara asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia.

“Pagi tadi kami telah bertemu dengan produsen kelapa sawit Indonesia dan kami menginginkan agar DPR dapat membantu kami untuk melancarkan kerja sama yang akan terjalin ini,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Alimin Abdullah mengatakan, jika Italia berminat untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang kelapa sawit, Indonesia pun sangat berminat mempelajari mengenai pengembangan teknologi yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan kelapa sawit.

“Kami menawarkan barter dengan pihak Italia, jika Italia bekerja sama

dalam eksportir kelapa sawit dengan Indonesia, kami ingin barter dengan teknologi yang dikembangkan oleh Italia mengenai pembangkit listrik tenaga kelapa sawit,” katanya.

Andi menambahkan, ia mendukung penuh jika ada pengusaha Italia yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di kedua negara.

“Kami akan sungguh-sungguh menjembatani kerjasama yang akan di jalin antara pemerintah maupun pengusaha Indonesia dan kami sangat mengapresiasi kedatangan delegasi Italia ke Indonesia. Kerjasama yang saling menguntungkan yang kedepannya akan semakin meningkatkan dukungan antar kedua negara dan lebih meningkatkan lagi dukungan antar kedua negara di forum Internasional,” terangnya. (ra) foto: tim parle

Komisi III Pertanyakan SK Pengetatan Remisi Menkumham

Beberapa anggota Komisi III DPR RI menilai surat Menkumham tentang pengetatan remisi bagi narapidana koruptor dan terorisme janggal dan bertentangan dengan UU No 12 tahun 1999 tentang Pemasarakatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.



Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/11).

“Apa betul surat edaran moratorium remisi itu bermula dari perintah Wakil Menteri dan hanya secara lisan lewat telpon. Harusnya untuk mencabut SK menteri sebelumnya (Patrialis Akbar) yang menyetujui pemberian remisi harus dibuat SK menteri baru, bukan pernyataan lisan,” tanya anggota Komisi III dari FPDIP Trimedya Panjaitan.

Sementara itu anggota Komisi III Ahmand Yani mempertanyakan SK menteri yang baru keluar pada tanggal 16 November, sedangkan surat edaran PLH Dirjan Pemasarakatan (Dirjen PAS) yang memerintahkan pembatalan remisi sudah berlaku sejak tanggal 31 Oktober. “Ini negeri hukum, negeri ini tidak bisa berdasarkan perintah

lisan, apa negeri ini kerajaan? Kalau tidak setuju, nggak usah ada remisi. Kalau mau hukuman mati koruptor kita setuju, asal dirubah dulu undang-undangnya. Kalau merujuk PP 28 tahun 2006, moratorium ini pengetatan model mana lagi?” tanya politisi dari FP3 ini.

Ia menekankan DPR mengkritisi kebijakan moratorium yang diubah menjadi pengetatan remisi bagi koruptor dan teroris semata-mata karena landasan hukumnya tidak jelas. “Saya menolak keras kalau ada yang menilai sikap kita dukungan terhadap koruptor. Kita mengingatkan kebijakan ini bisa masuk kategori pelanggaran terhadap UU,” lanjutnya. Bagi Yani jalan satu-satunya bagi pemerintah saat ini adalah segera menormalkan kembali suasana ini merujuk peraturan yang sudah ada. Deskripsi boleh saja dilakukan sepanjang ia tidak diatur jelas oleh ketentuan perundang-undangan. Ka-

lau semua aturan sudah jelas, maka deskresi tidak berlaku.

Anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy menyebut surat edaran Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM bisa dinilai diskriminatif karena pengetatan remisi berlaku menjelang pelaksanaan Natal yang dirayakan umat kristiani. Hal senada juga disampaikan Herman Hery dari FPDIP. “Sembilan puluh persen napi di NTT, tidak akan dapat remisi Natal. Orang Kristen dan Katolik di NTT akan bilang apa? Kenapa dihilangkan remisi Natal. Tidak boleh menyingung yang begini. Menteri harus minta maaf dan cabut,” cetus Hery.

Namun pembelaan datang dari Ruhut Sitompul anggota Komisi III dari FPD yang menyebut pengetatan remisi ini bukan untuk Umat Kristiani tetapi bagi koruptor. “Kebijakan menteri tidak salah karena kita tahu rakyat miskin karena ulah koruptor. Jadi saya tegaskan koruptor jangan dikasi ampun. Bagi saya yang Kristen, ini tidak ada masalah,” tandasnya.

Dalam penjelasannya Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyebut kebijakan pengetatan remisi tidak bermuatan politik dan bukan pula ajang mencari popularitas. Mantan advokat ini menambahkan keputusan dilandasi aturan perundang-undangan yakni UU No 12 tahun 1999 tentang Pemasarakatan. Dalam pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa pengaturan bagaimana mengatur remisi, pembebasan bersyarat dan lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Karena itu lahir PP yang semula PP 32 tahun 1999 diubah menjadi PP 28 tahun 2006. Kemudian kalau ada pertanyaan ukuran rasa keadilan, itu tidak semata datang seakan aspirasi yang jatuh dari langit itu sudah diatur dalam PP 28 tahun 2006 maupun pa-

sal 36 ayat 6 yang bicara tentang rasa keadilan. PP 28 tahun 2006 mengatur pemberlakuan khusus bagaimana memperlakukan warga binaan di lapas menjalani masa pembinaan secara khusus,” katanya.

Ia juga mengakui surat edaran Dirjen Pemasyarakatan berasal dari perin-

tah lisan wakil menteri dan pada saat itu belum didukung keputusan Menteri. Namun ditekankannya perintah melalui telepon itu sudah dibicarakan sebelumnya. Terkait perbedaan penafsiran terhadap kebijakan yang dibuatnya Menkumham mempersilahkan pihak-pihak yang merasa keberatan

mengujinya di PTUN. “Saya tidak claim penafsiran saya paling benar, kebijakan Bapak Ibu tidak benar. Perlu forum yang sah untuk menguji SK tersebut. Apapun yang keluar dari pengujian SK itu saya tidak akan banding, saya akan laksanakan,” demikian Amir Syamsudin. (iky) foto: tim parle

DPR Sahkan UU Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty-CTBT) menjadi Undang-Undang. Dalam Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (6/12), di Gedung Nusantara II, Jakarta.



Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq (kiri) menyerahkan pengesahan RUU Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq dengan diratifikasinya CTBT akan memperkuat standing dan credentials Indonesia sebagai Negara yang senantiasa mendukung dan berkomitmen terhadap non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir serta dapat memperkuat posisi Indonesia untuk ikut mendesak Negara-negara lain dalam mempercepat ratifikasi CTBT.

Pada tingkat regional, ratifikasi CTBT ini dapat memberikan sumbangan kepada pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan dan akan menjadi pendorong bagi upaya membangun

rasa saling percaya diantara Negara-negara di kawasan Asia.

Disamping itu, ratifikasi CTBT juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan teknologi geofisika, nuklir, dan informatika dalam rangka pengembangan dan penelitian, antara lain dalam penembangan mekanisme peringatan dini (early warning system) terhadap kemungkinan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan pelucutan, pelarangan,

penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir. Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia sehingga resiko pecahnya perang nuklir tetap menjadi keprihatinan internasional. “Ancaman malapetaka nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia itu hanya dapat dihilangkan melalui penghapusan seluruh senjata nuklir yang harus dilakukan tanpa syarat, mengikat secara hukum non-diskriminatif dan tanpa menggunakan standar ganda yang berlaku bagi semua Negara tanpa terkecuali,” kata Mahfud Siddiq. (as)/foto:iw/parle

Komisi X DPR Menyayangkan Pengembangan Pariwisata di NTB Terabaikan

Komisi X DPR sangat menyayangkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok tidak tergarap dengan baik sehingga peluang pengembangan pariwisata di NTB ini terabaikan.

“Karena masih ada kendala yang dihadapi yaitu masalah infrastruktur dan masalah kesiapan masyarakat atau dukungan masyarakat terhadap penciptaan iklim yang kondusif dalam memajukan pariwisata,” kata ketua tim Zulfadhli (F-PG) kepada Tim Parle usai meninjau obyek wisata unggulan di Provinsi NTB, Jum’at (2/12).

Menurutnya, dua masalah ini harus menjadi prioritas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kalau mau menempatkan pariwisata ini menjadi sektor unggulan.

Khusus untuk infrastruktur, jelasnya, memang ini perlu dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat. “Karena pariwisata ini ‘kan hulu dari

dana yang besar dari pemerintah pusat dalam rangka menunjang percepatan pembangunan infrastruktur untuk NTB.

Pemprov NTB juga harus mampu membuat kondisi yang kondusif untuk masyarakat supaya bisa mendukung program pariwisata. Karena selama ini kita lihat masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum mendukung program pariwisata yang ada di NTB. “Mungkin ini perlu adanya pendekatan-pendekatan atau terapi khusus dari Pemprov NTB agar mereka bisa sadar bahwa sektor pariwisata ini juga akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Dia berharap Pemprov NTB akan

satawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), Zulfadhli mengatakan, itu tidak terlalu sulit kalau hanya target satu juta wisman dan wisnus karena tahun 2011 saja mencapai 850 wisman dan wisnus. “Saya yakin dan optimis tercapai kalau untuk mencapai satu juta wisman dan wisnus. Kalau perlu targetnya bisa mencapai dua kali dari tahun 2011, supaya bisa mengejar ketertinggalan pariwisata Lombok dari Bali. Kalau Bali bisa tujuh juta per tahun, paling tidak imbasnya ke Lombok,” kata Zulfadhli.

Intinya dari hasil kunjungan spesifik ini, Komisi X DPR akan segera merekomendasikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mendukung Program Visit Lombok – Sumbawa tahun 2012, dan NTB menjadi daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Bali, ujarnya.

Kunjungan Spesifik Komisi X DPR ke



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau salah satu objek wisata di NTB

berbagai sektor lainnya termasuk sektor transportasi perlu dukungan, dan pekerjaan umum (PU) ini juga harus memberikan porsi yang besar untuk memajukan pariwisata di NTB ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Zulfadhli, Pemprov NTB harus lebih proaktif untuk dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa Pemprov NTB perlu dukungan

lebih giat lagi untuk memajukan sektor pariwisata ini dengan memajukan industri pariwisata, khususnya pengembangan di daerah khusus pariwisata di NTB. Karena tahun 2012 NTB merupakan tahun puncak Visit Lombok – Sumbawa, maka Pemprov NTB harus lebih gencar lagi mempromosikannya dalam negeri dan luar negeri, tambahnya.

Terkait dengan masalah target wi-

Provinsi NTB terdiri atas 11 orang yang dipimpin Zulfadhli (F-PG) dari sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Yunus Roichan, Jefirstson R. Riwu Kore, Sholeh Soe’Aidy, dan Nurul Qomar (F-PD); Selina Gita (F-PG); Irsal Yunus dan Guruh Irianto Sukarno Putra (F-PDI Perjuangan); Tb. Soenmandjaja (F-PKS); Hisyam Alie (F-PPP); dan Djamal Azis (F-Partai Hanura). (iw)/foto:iw/parle.

Komisi I DPR RI Tanyakan Penempatan Pasukan Amerika di Darwin

Komisi bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempertanyakan peningkatan kerjasama militer Amerika dan Australia dengan menempatkan Pasukan Militer Amerika di Darwin Australia dan non-teritori.

Saat Komisi I DPR RI menerima Kunjungan Duta Besar Amerika Scoot Marciel. Selasa (6/12) di Gd. Nusantara II, DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq (F- PKS) dalam pertemuan tersebut di dampingi M.Najib (F-PAN), Yorys Rawiyai, dan Susaningtyas Nefo Handayani (F-Gerindra) mengatakan sangat mungkin kerjasama militer Australia dengan Amerika, walaupun merupakan hal yang terpisah dengan Indonesia khususnya dinamika di Papua.

Tetapi karena hal ini terjadi di waktu yang bersamaan, sehingga memunculkan tafsiran yang beragam, termasuk biasa saja itu dianggap suatu sinyal bagi siapapun dengan kepentingannya masing-masing. "Bagi unsur separatis di Papua biasa saja akan dimanipulasi informasi itu, seolah-olah ada duku-

ngan politik. Bagi Indonesia bisa juga ini ditafsirkan suatu bentuk warning atau kesiagaan Amerika terhadap dinamika yang terjadi," ungkap Mahfud Siddiq.

Mengutip penjelasan Dubes Amerika Scoot Marciel, hal tersebut merupakan konteks kerjasama bilateral pertahanan militer antara Amerika dengan Australia yang sudah berlangsung lama, dan penempatan pasukan itu bukan di pangkalan Amerika, namun di pangkalan militer Australia. "Dalam konteks kerjasama militer lalu ada penempatan itu, alasannya karena kepentingan Amerika yang ingin terus dipertahankan untuk pengamanan kawasan," katanya.

Penempatan itu dilakukan secara bertahap, target sampai 25.000 personil yang dilakukan secara bertahap sepanjang 2012.

Peningkatan kerjasama militer itu, tidak ada kaitannya dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Khususnya tidak ada kaitannya dengan masalah di Papua. "Khusus terkait dengan Papua, Dubes Amerika menjelaskan Pemerintah Amerika memandang Papua merupakan bagian dari NKRI, dan mereka menghormati kedaulatan itu dan tidak mendukung segala bentuk separatisme di Papua maupun di daerah lain," jelasnya.

Freeport bukan kepentingan utama Amerika di Indonesia, disampaikan Dubes Amerika itu hal yang kecil saja dan Amerika sampai saat ini tidak pernah mengirim tentaranya ke Freeport. Seluruh pengamanan Freeport selama ini diserahkan sepenuhnya kepada Polri dan yang dibantu TNI.

Mengenai adanya tafsir peningkatan kerjasama militer Amerika dan Australia dengan menempatkan pasukan pada Pangkalan Militer Australia di Darwin mengancam keamanan Indonesia, Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq untuk kerjasama itu menegaskan bahwa peningkatan hubungan militer Amerika dengan Australia kalau hanya dibatasi bilateral, itu membuka tafsir-tafsir yang beragam, termasuk tafsir yang lihat ini ancaman.

Untuk itu Mahfud Siddiq mengusulkan Kerjasama harus mulai dikembangkan kerjasama Trilateral, jadi Indonesia, Australia dan Amerika untuk keamanan kawasan, terutama Alqi alur laut kepulauan Indonesia yang melintasi jalur timur Indonesia. Karena di situ ada kepentingan Australia dan kepentingan Indonesia. "Kalau Trilateral ini dibangun dan dikembangkan bisa meminimalkan atau menutup tafsir-tafsir yang beragam tadi," tegasnya.

Selain itu, Komisi I minta Pemerintah Amerika mendorong Freeport sebagai perusahaan Amerika untuk lebih banyak memberikan kontribusi pembangunan masyarakat di sekitar Papua, melalui dana-dana perusahaan. Karena tetap saja publik melihat, Freeport telah mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil bumi di Papua. (as) foto: as



Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq (kiri) saat menerima Duta Besar Amerika Scoot Marciel (kanan)

Komisi X Tinjau Perpustakaan Desa di Sumatera Utara

Untuk melihat dari dekat program perpustakaan desa, Komisi X DPR RI, komisi yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan industri kreatif, kesenian, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan ini melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke sejumlah desa di Provinsi Sumatera Utara, (2/12). Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi, H. Asman Abnur (F-PAN).



Anggota Komisi X DPR Theresia EE. Pardede (kiri) Tim Komisi X DPR saat pertemuan dengan pengurus Perpustakaan Desa Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang Sumut

Saat pertemuan dengan pengurus Perpustakaan Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Ketua Tim Komisi X, Asman Abnur mengatakan, kedatangan tim Komisi X DPR dalam rangka melihat dari dekat kondisi dan perkembangan perpustakaan desa. “Kami betul-betul ingin melihat apa yang diomongkan para pejabat di Jakarta mengenai perpustakaan desa, bagaimana kondisinya di lapangan,” tukas Ketua Tim. Kepada para pengurus Asman Abnur meminta agar tidak segan-segan menyampaikan unek-unek dan permasalahan yang dihadapi secara terbuka.

Lebih lanjut Asman Abnur mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan di negara kita tidak lain adalah pendidikan, buku adalah salah satu unsur utama dalam pendidikan. “Sebenarnya jika setiap warga masyarakat mau menyumbangkan 5 buku saja, selesai sudah persoalan kekurangan buku,” ujarnya. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan pulau Batam Kepri ini menambahkan, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

“Setiap negara yang pendidiknya maju, pasti negaranya maju,” tegasnya meyakinkan.

Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut, Syaiful Syafri mengatakan dari 12.500 sekolah dasar di 33 Kab./Kota di Sumut belum semua memiliki perpustakaan. “Di desa ini saja ada 6 SD tapi hanya ada 1 perpustakaan desa,” ucap Syaiful. Jalal, SH. Kepala Desa Bandar Setia menyampaikan, salah satu kendala yang dihadapi adalah ruang perpustakaan yang terlalu sempit. “Ruang perpustakaan yang sekarang terlalu kecil, rencananya kami akan merehab ruang aula untuk perluasan perpustakaan,” ungkap Jalal. Untuk itu Jalal meminta kepada anggota Komisi X DPR agar dapat membantu pembangunan ruang termasuk juga untuk honor bagi pengurus. “Selama ini para pengurus perpustakaan desa tidak memiliki honor, mereka bekerja sukarela,” ungkap Jalal.

Subariah, pengurus perpustakaan desa mengungkapkan, tidak hanya anak-anak sekolah yang memanfaatkan perpustakaan, ibu-ibu pun banyak

yang membaca buku di perpustakaan, terutama buku-buku tentang kerajinan dan usaha kecil. “Setiap hari sekitar 30-40 anak yang memanfaatkan perpustakaan, ibu-ibu juga senang dengan perpustakaan ini,” katanya. Dari hasil membaca buku itu ibu-ibu di Desa Bandar Setia kini telah berhasil mengembangkan usaha rumahan kerajinan makanan kecil, seperti keripik dan kue kering yang sering dijadikan buah tangan.

Selain mengunjungi perpustakaan desa di Kec. Percut Sei Tuan, Tim Komisi X DPR RI juga meninjau perpustakaan di Desa Tumpatan Nebung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang dan perpustakaan di kantor Kelurahan Terjun Kec. Medan Marelان, Kota Medan. Anggota Komisi X yang turut serta pada kunjungan kali ini: Juhaini Alie, Parliungan Hutabarat, Theresia EE. Pardede (F-PD), HM. Nasrudin, Hetifah (F-PG), Rohmani (F-PKS), Ibrahim Sakti Batubara (F-PAN), H. Abdul Hamid Wahid (F-PKB), Jamal Mirdad (F-Gerindra), dan H. Herry Lontung Siregar (F-Hanura). (Rn. Tvp)

BPH Migas Harus Jamin Ketersediaan BBM di Seluruh Indonesia

Anggota Komisi VII DPR Mardani mengkritisi peran dan fungsi BPH Migas. pasalnya, sampai saat ini, BPH Migas belum menjamin secara maksimal ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM keseluruhan NKRI.



Anggota Komisi VII DPR Mardani

“Selama ini pemerintah tidak mampu dalam menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia sehingga sering terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian masyarakat dan terhambatnya mobilitas perekonomian, khususnya di daerah luar Jawa,” jelasnya kepada Parle baru-baru ini se usai fit and proper test ketua dan anggota BPH Migas periode 2011-2015, di Gedung DPR RI

Dalam isu tersebut, fungsi regulator body yang membuat aturan main dan supervisor body yang mengawasi dirasakan kurang dapat menjamin terlaksananya fungsi penyediaan BBM ke seluruh pelosok NKRI. “Seharusnya BPH Migas jangan pasif tapi aktif dalam membuat terobosan, termasuk diantaranya mengusulkan agar energi mix atau kebijakan tidak melulu tergantung pada BBM tapi mengandalkan Gas bumi,” Tambah Mardani yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas.

Disampaikan juga, bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan kepemilikan tujuh unit kilang pengolahan minyak yg cuma

menghasilkan 720 mbsd, sedangkan kebutuhan nasional 1069 mbsd. “Jadi ada sekitar hampir 400-an mbsd yg harus diimpor dan pada saat yang sama pola transportasi yg digunakan mayoritas menggunakan kapal tanker pada hal mestinya pipa jaringan distribusi sudah harus dilakukan.” Imbuh Mardani.

Dengan sistem transportasi menggunakan tanker ini kemungkinan hambatan terhadap kepastian kesediaan BBM diseluruh pelosok dapat bermasalah karena ombak laut 3 meter saja tanker tidak dapat merapat kepelabuhan, sehingga timbul ketidakpastian. Padahal mayoritas wilayah kita negara kepulauan.

Isu lain adalah mengenai keberanian anggota BPH Migas untuk segera mencabut subsidi yg tidak tepat sasaran karena subsidi yg ada sekarang ini justru diberikan kepada bahan bakar konvensional bukan diberikan kpd gas. Mardani menambahkan, “Jika pemerintah mampu mengkonversi bbm konvensional bensin dan solar menggunakan elpiji maka tidak kurang dari

33 trilyun dapat dihemat oleh pemerintah. Itu jauh lebih murah, bersih, dan sehat ketimbang kita tetap mensubsidi bahan bakar konvensional.

Mardani menyayangkan, ketiga isu diatas yang merupakan persoalan mendasar BPH Migas ternyata belum mampu ditangkap secara baik oleh peserta fit and proper test. “Saya belum melihat peserta mampu melihat persoalan mendasar tersebut sebagai isu kritis yang harus segera diselesaikan di BPH Migas”. Jelas politisi PKS ini.

Seperti kita ketahui, dalam fit and proper test pemilihan ketua dan anggota BPH Migas yang berlangsung sejak 5 Desember 2011 hingga 8 Desember 2011 di DPR RI. “Komisi VII DPR RI akan memilih 9 dari 18 calon Ketua dan Anggota BPH Migas masa jabatan 2011-2015. Sejak senin dan selasa telah di fit and proper test sebanyak sebelas calon dan akan dilanjutkan pada rabu ini.” Demikian Mardani yang berasal dari Dapil VII Jabar (Kab Bekasi, Karawang dan Purwakarta).(si) foto:tim parle

Pemda Babel Minta Komisi X DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Bandara Internasional

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung (Pemda Babel) meminta bantuan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk membangun Bandara Internasional di Babel yang merupakan destinasi wisata unggulan internasional setelah Bali dan Lombok.



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau Destinasi Pariwisata Bangka Belitung di Pangkal Pinang

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Babel Imam Mardi Nugroho dihadapan Tim Kunjungan Komisi X DPR RI dan stakeholder kepariwisataan Babel, di Pangkal Pinang, beberapa hari lalu.

Tim kunjungan Komisi X DPR RI dalam rangka peninjauan destinasi pariwisata Provinsi Babel dipimpin Utut Adianto (Wakil Ketua Komisi X dari F-PDIP) dengan anggota Mahyuddin (Ketua Komisi X dari F-PD), Muslim (F-PD), Oelfah A. Harmanto (F-PG), Itet Trijajati Sumariyanto (F-PDIP), Raihan Iskandar (F-PKS), Nasrullah (F-PAN), Mahmud Yunus (F-PPP).

Kami mengharapkan Komisi X DPR RI dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun bandara internasional sekaligus membuka rute penerbangan Garuda dari Jakarta tujuan Tanjung Pandan Kabupaten Belitong," ujar Imam.

Imam menyatakan bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan Babel

menjadi destinasi berkelas dunia, masih diperlukan banyak hal, seperti peningkatan aksesibilitas antara lain mengembangkan bandara yang ada menjadi bandara internasional, peningkatan infrastruktur serta peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Saat ini menurut Imam, Bandara H. as Hanandjoeddin Tanjung Pandan Belitong belum bisa didarati pesawat berbadan lebar. Secara berkala sudah ada beberapa maskapai penerbangan swasta yang sudah membuka rute penerbangan ke Belitong. Namun untuk mendukung program pariwisata diharapkan intensitas penerbangan dari Jakarta tujuan Belitong semakin meningkat jika Garuda juga terbang ke Belitong.

Ia menginformasikan, bahwa pada 2009 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik telah menandatangani Peraturan Nomor PM.33/UM.001/

MKP/2009 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan, termasuk di dalamnya Provinsi Babel.

"Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut dan sesuai RPJMD Tahun 2007-2012 Pemprov Babel membuat dan melaksanakan program sektor kepariwisataan "Visit Babel Archipelago 2010" dan "Sail Wakatobi Belitong 2011"," ujarnya.

Menurut dia, kedua program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan kepariwisataan, investasi di bidang perhotelan, rumah makan, tempat hiburan, perbaikan dan penambahan sarana transportasi darat, laut dan udara serta membangkitkan aktivitas kepariwisataan di tiap kabupaten/kota.

"Wisatawan mulai berdatangan baik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara sehingga kemajuan pembangunan pariwisata semakin meningkat," imbuhnya. (sc) foto: tim parle

Kementerian PU Diminta Lakukan Investigasi Menyeluruh Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan investigasi secara menyeluruh atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara dengan membentuk Tim Independen.

Tim Independen ini berasal dari para pakar bidang konstruksi khususnya konstruksi jembatan dari Perguruan Tinggi (ITB, ITS, UGM, UI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia dan Litbang PU serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR paling lambat 30 hari kerja.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi saat memimpin rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri PU, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Kakorlantas Polri, Kepala Basarnas, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Direksi PT Hutama Karya, PT Perentjana Djaya, PT Bukaka Teknik Utama beserta jajarannya, Kamis sore (1/12) di gedung DPR.

Pada kesimpulan berikutnya, Mulyadi menyampaikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang, Komisi V DPR meminta Kementerian PU melakukan audit teknis terhadap jembatan dengan bentang panjang, terutama jembatan dengan sistem Suspension dan Cable Stay.

Komisi V DPR juga mendukung upaya-upaya Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban yang sampai saat ini masih menemui beberapa kendala serta meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya perawatan serta memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Guna menjamin aksesibilitas wilayah, Komisi V DPR mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk mengadakan sarana transportasi darurat untuk menggantikan sementara fungsi jembatan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, Menteriannya masih melakukan penyelidikan secara intensif apa penyebab runtuhnya jembatan tersebut. Penyebab sementara runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara yang baru berusia 10 tahun ini karena lemahnya titik buhul atau sambungan kabel vertikal dan kabel utama jembatan.

Jembatan dengan bentangan sepanjang 710 meter itu diresmikan pada tahun 2001. Jembatan itu melintasi Sungai Mahakam, menghubungkan Kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Hingga kemarin, 20 orang meninggal dan diduga 17 orang masih dalam pencarian.

Djoko menambahkan solusi yang

dilakukan Pemerintah setelah runtuhnya jembatan, yang tercepat mengatasi dengan Kapal Ferry. Karena, kata Djoko, jika menunggu jembatan baru akan dibangun memerlukan waktu yang lama. Padahal jembatan ini sangat vital penggunaannya.

Kementerian Perhubungan telah menyiapkan kapal Ferry, namun kendalanya belum ada dermaga berlabuhnya kapal tersebut. Untuk membangun dermaga pihaknya kesulitan dana. Setelah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap untuk membuat dermaga.

Konsultan proyek pembangunan jembatan Kutai Kartanegara, PT Perentjana Jaya mengklaim telah me-



Menteri PU Djoko Kirmanto

menuhi proses uji spesifikasi bahan. Pengujian dilakukan di Australia pada 1994-1996.

Dirut PT Utama Karya Tri Widjajanto mengatakan, konstruksi juga sudah sesuai spesifikasi. PT Utama Karya merupakan kontraktor pembangunan jembatan tersebut.

Menurut Widjajanto, kepala proyek yang mengawasi pembangunan jembatan tersebut pengawas terbaik dan salah satu pakar jembatan bentang terbaik. Jembatan tersebut juga dibangun dengan prinsip kehati-hatian,

keseimbangan, keakuratan dan ketelitian serta melalui tahapan-tahapan yang direncanakan.

Kegagalan Konstruksi

Pada kesempatan yang sama. Anggota Komisi V DPR dari PDI Perjuangan Rendhy Lamadjido menyampaikannya, dari beberapa analisa pakar, dia melihat runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara itu merupakan kegagalan konstruksi.

Rendhy melihat pembangunan

jembatan dari awal sudah mengalami reformasi mengakibatkan penurunan daripada bantalan jembatan berkisar 8 – 10 cm. Menurutnya, ini kegagalan pemerintah dalam mengobservasi bangunan.

Dia menyesalkan kenapa Pemerintah sudah tahu ada pergeseran 8 – 10 cm dibiarkan terus, bahkan mengalami penurunan. Seharusnya Pemerintah Pusat mengambil tindakan tegas menutup jembatan itu dan segera dilakukan perbaikan sebelum terjadi runtuhnya jembatan. (tt)foto:ry/parle

Komisi X DPR Soroti Anggaran Pariwisata NTB

Komisi X DPR prihatin terhadap obyek wisata unggulan Lombok-Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan posisi strategis dekat Bali ternyata mendapat kucuran anggaran dari pusat lebih kecil dibandingkan Bali.



Ketua Tim Komisi X DPR, Zulfadhli

Pasalnya, Bali mendapat kucuran dana tinggi sekali dalam rangka menunjang pariwisata. Jadi ada kesenjangan antara NTB dan Bali dalam rangka menunjang pariwisata ini.

Demikian hal ini diungkapkan Ketua Tim Komisi X DPR, Zulfadhli (F-PG) saat pertemuan dengan Kadinasi Kebudayaan dan Pariwisata, PHRI, ASITA, PUTERI dan pihak-pihak yang terkait

dengan kepariwisataan, di ruang rapat Kadinasi Pariwisata NTB, Jum'at (2/12).

Zulfadhli menambahkan, kita tahu bahwa APBD Pemprov NTB sangat terbatas dan Pemprov NTB tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, menurutnya, anggaran pariwisata NTB ini harus ditingkatkan dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Komisi X DPR akan memperjuang-

kan anggaran pariwisata Pemprov NTB ini kepada pemerintah pusat agar Pemprov NTB mendapat kucuran dana lebih besar lagi untuk pembangunan pariwisata di NTB, tambahnya.

Intinya, lanjut Zulfadhli, Pemprov NTB harus bisa berkomunikasi secara intensif dan memberi support kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan perhatian besar kepada NTB. Begitu juga kalau Pemprov NTB mau berkomunikasi dengan Komisi X dibangun secara intensif, kedepan “Insya Allah” Komisi X dapat berbuat banyak untuk NTB ini walaupun tidak sama sekali perwakilan atau dapil NTB yang masuk di Komisi X, jelasnya.

“Kalau kita berbicara program tidak didukung dengan anggaran yang besar itu pasti agak susah,” kata Zulfadhli seraya menambahkan karena anggaran pariwisata ini kewenangannya ada di kementerian dan Komisi X.

Kita tahu NTB ini masuk daerah prioritas tapi pengalokasian anggarannya oleh pusat ini kurang tepat sasaran, mereka tidak memberikan anggaran yang cukup kepada Pemprov NTB, himbuhnya.(iw)/foto:iw/parle.

Pendidikan Berhasil Kalau Semua Berperan

Bangsa Indonesia tidak akan pernah mampu bersaing dengan bangsa lain di era global, kalau lalai memberi perhatian pada bidang pendidikan.

Keberhasilan pendidikan bukan sekedar masalah pemerintah, besarnya anggaran, tapi juga seberapa besar perhatian masyarakat terhadap pendidikan anak bangsa. Segenap komponen masyarakat harus mengambil peran masing-masing, sekecil apapun yang bisa diberikan.

“Masalah pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Saya kampanye kemana-mana, agar kita semua mengambil peran yang kita bisa, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak bangsa. Ada tanggung jawab guru dan dosen, tapi ada tanggung jawab kita anggota masyarakat,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam Sidang Terbuka Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) di Kampus B UIGM, Palembang, Sumsel, Sabtu (3/12/11).

Dalam pidatonya, politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri ini berbagi pengalaman bagaimana awal perannya terlibat di bidang pendidikan. Ia menyebutnya sebagai sebuah mimpi sangat sederhana, untuk mendukung masyarakat yang pada saat itu masih kesulitan memperoleh pendidikan yang layak. Pada tahun 1998 berdirilah pendidikan tinggi yang fokus pada bidang manajemen informatika. “Berkat kredibilitas yang terbangun lama sebelumnya saat saya menjadi dirut sebuah BUMN, akhirnya saya memperoleh pinjaman dari bank untuk melanjutkan pembangunan sekolah,” paparnya.

Karena sambutan masyarakat yang juga luar biasa, perkembangan sekolah dibawah bendera IGM berlangsung pesat. Pada tahun 2002 yayasan melebarkan sayap dengan membangun SMA, tahun 2004 SMP dan dilanjutkan pembangunan SD pada tahun 2006.

Marzuki menyebut upaya mendukung dunia pendidikan merupakan peran sosialnya ditengah masyarakat.

“12 tahun saya jalani sendiri, saya tidak bergabung bersama orang lain karena orang mungkin berfikir bagaimana mencari untung dari sekolah ini. Jadi disini tidak ada satu rupiah pun dari sekolah ini yang kembali kepada kita tapi betul-betul kita kembalikan kepada anak-anak, bagaimana pendidikan itu semakin hari semakin baik, meningkat, meningkat,” tandasnya.

Universitas IGM saat ini sedang menyelesaikan kampus A dengan fasilitas lebih baik, gedung sembilan lantai. Yayasan juga mampu meningkatkan peran sosialnya dengan membangun dua gedung tiga lantai yang sejak awal difokuskan melayani pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. “Jadi kita mengelola pendidikan yang paling mahal di kota Palembang, tapi bagi yang tidak mampu kita juga mem-

bangun sekolah yang baik dan tidak bayar,” imbuhnya.

Bagi Ketua DPR Marzuki Alie kebagiaan bekerja dibidang pendidikan adalah pada saat mendapat kabar para murid dan mahasiswa meraih prestasi dan berhasil dibidangnya. Apalagi kesuksesan para siswa yang datang dari keluarga miskin yang pada saat sekolah dibekali kemampuan wirausaha. Di sekitar sekolah telah disiapkan sarana pendukung sehingga para siswa dapat belajar beragam kemampuan yang dapat menunjang keterampilan mereka dalam berwirausaha.

“Kita telah membantu menunjukkan dengan bersekolah mereka mampu mensejahterakan diri mereka dan keluarga. Jadi saya mengajak teman-teman yang punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama, supaya anak-anak bangsa memperoleh kesempatan mendapat pendidikan,” demikian Marzuki.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam acara Sidang Terbuka Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Sumsel

Meningkatkan Keunggulan dengan Inovasi

Menteri Negara Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta yang menyampaikan Orasi Ilmiah dalam acara tersebut mengaku tersentuh dengan keseriusan Ketua DPR Marzuki Alie dalam berperan mendukung pendidikan. "Saya terharu dan terpacu melihat perjuangan Pak Marzuki membangun pendidikan di Palembang. Orang tua saya juga bukan orang yang berada tapi beliau melakukan berbagai upaya untuk menyekolahkan saya," ujarnya saat memulai pidatonya.

Walaupun masih berkuat menghadapi banyak tantangan dan kekurangan namun menurut menteri pendidikan Indonesia sudah mulai meraih prestasi. Ia menyebut semakin seringnya pelajar Indonesia kembali

ke tanah air dengan kalungan medali setelah menjuarai beragam kompetisi Internasional. Keberhasilan lain, sudah semakin banyak orang Indonesia setelah lulus kuliah bekerja di perusahaan asing dan kemudian sukses menjadi pimpinan perusahaan bahkan di manca negara.

Di dalam negeri menurut menristek, sudah saatnya para sarjana termasuk wisudawan UIGM berperan dalam meningkatkan produktifitas nasional melalui inovasi-inovasi. "Kita tahu keunggulan sementara perekonomian kita berbasis pada keunggulan komparatif sumber daya alam (SDA). Lama kelamaan SDA akan habis, sekarang saatnya kita mentransformasikan perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dengan meningkatkan produktifitas nasional melalui inovasi," imbuhnya.

Kementerian Riset dan Teknologi menurut Gusti telah menetapkan program utama memperkuat Sistem Inovasi Nasional (Sinan) yang dalam operasionalnya juga melakukan perkuatan Sistem Inovasi Daerah (Sida). Program ini perlu peran para pengembang teknologi termasuk perguruan tinggi, pengguna teknologi dan para pihak yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif. Ia berharap UIGM dapat mengambil peran dalam mengembangkan inovasi iptek yang relevan dengan realita kebutuhan nasional maupun lokal. "Yang kita teliti sesuai kebutuhan masyarakat hingga membantu penyelesaian masalah. Misalnya terkait pemanasan global kita bantu inovasi padi tahan kering atau tahan banjir," jelas menristek. (iky) foto :ik/parle

DPR Putuskan 9 Nama Anggota Komite BPH Migas

Komisi VII DPR menetapkan 9 nama Anggota Komite BPH Migas. Berikut nama kesembilan orang tersebut, Fanshurullah Asa 38 suara, Andy Noorsaman Sommeng 36 suara, Fahmi Harsandono 35 suara, Sumihar Panjaitan 34 suara, Saryono Hadiwidjoyo 31 suara, Mayjen TNI (Purn) Karseno, 30 suara, Martin Samodra Ritonga 29 suara, Ibrahim Hasyim 26 suara, dan terakhir A. Qoyum Tjandranegara dengan 26 suara.

Setelah 9 orang terpilih, kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefki Harsya, 3 orang suara terbanyak yaitu Fanshurullah Asa, Andy Noorsaman Sommeng dan Fahmi Harsandono akan diadu dalam putaran kedua pe-

milihan Ketua BPH Migas. berdasarkan mekanismenya, lanjut Riefky, Anggota DPR memilih maksimal 9 nama dari 18 calon anggota tersebut. 9 peserta otomatis ditetapkan menjadi anggota komite badan pengatur BPH Migas.

Satya W. Yudha (F-PG) mengatakan, tiga besar tersebut cukup profesional dan memiliki kans besar menjadi Ketua BPH Migas. "Mereka cukup profesional semuanya, dan sesuai dengan backgroundnya," jelasnya.

Menurutnya, seorang Ketua BPH Migas harus memahami industri hilir migas dan mampu membangun infrastruktur dan pengendalian subsidi BBM kedepannya selain itu perlu juga diwaspadai persoalan penimbunan BBM yang kerap kali terjadi saat ini. "Kita lihat saja nanti, Golkar sih mendukung ketiga perolehan suara terbesar," paparnya ketika ditanya dukungan Golkar bagi ketiga calon itu. Sampai berita ini ditulis, masih berlangsung proses pengambilan suara Ketua BPH Migas di Ruang Rapat Komisi VII DPR. (si)/foto:iw/parle.



Penetapan 9 nama Anggota Komite BPH Migas oleh Komisi VII DPR RI

DPR Tetapkan Dewas LPP TVRI 2011-2016

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2011-2016.



Anggota Komisi I DPR RI Guntur Sasono

Dra.Immas Sunarya,MM, Elprisdad, Indrawadi Tamim,PhD, Bambang Soeprijanto, Akhmad Sofyan,S.Sos. terpilih sebagai Dewas LPP TVRI dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (6/12), Gedung Nusantara II, Jakarta.

Laporan Komisi I mengenai Pemilihan dan Penetapan Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2011-2016 yang disampaikan Anggota DPR RI Guntur Sasono menyampaikan dengan ditetapkannya Dewas LPP TVRI yang selanjutnya akan bertugas menyusun kebijakan dan strategi pengemba-

ngan TVRI serta pengangkatan Dewan Direksi.

Komisi I yang membidangi penyiaran mengharapkan kiranya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dapat berkembang secara sehat sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan sehat, serta media control, perekat social dan pelestarian budaya bangsa.

Menurut Guntur Sasono, masyarakat menaruh harapan besar terhadap LPP TVRI yang merupakan Televisi Perjuangan dan mempunyai komitmen kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. TVRI diharapkan dikelola secara professional dan mewujudkan visi dan misinya serta memberikan kontribusi penting melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan masyarakat dan berperan serta memajukan bangsa. (as)/foto:iw/parle.

Komisi XI DPR Tetapkan Deputi Gubernur BI

Komisi XI DPR akhirnya menetapkan Ronald Waas dan Muliaman D Hadad sebagai Deputi Gubernur Bank

Indonesia dalam pemilihan yang menggunakan sistem pemungutan suara di Komisi XI DPR, Rabu (7/12) malam ini.

Ronald memperoleh 37 suara, mengalahkan Perry Warjiyo yang memperoleh 18 suara. Adapun Muliaman memperoleh 38 suara, mengalahkan Ronald yang mendapatkan 17 suara.

Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan Muliaman dianggap berhasil menjalankan jabatannya.

“Jadi, bisa meneruskan jabatan sebelumnya,” katanya. Saat pemaparan Selasa lalu, Muliaman menawarkan perizinan berlapis yang dibutuhkan untuk membatasi lingkup bisnis bank asing. Ia mengusulkan penerapan ring fencing untuk melindungi sistem keuangan nasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah menambahkan, Muliaman menguasai masalah. Posisinya sebagai calon incumbent mening-

galkan beberapa catatan, antara lain pembobolan deposito El Nusa di Bank Mega. (si) foto: parle





Penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 oleh DPR RI melalui perolehan suara terbanyak dari masing-masing calon.
9 Desember 2011 foto: iw/parle



Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menetapkan anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Periode 2011 hingga 2016 (foto kiri) dan empat Pimpinan KPK yang terpilih lewat uji kepatutan dan kelayakan (foto kanan).
6 Desember 2011 foto: IW



Kegiatan Parlemen Remaja Tingkat Mahasiswa 2011 mengusung tema "Rekonstruksi Fungsi Parlemen Melalui Generasi Muda" dihadiri anggota DPR Ganjar Pranowo sebagai salah satu pembicaranya.
2-6 Desember 2011 foto: AS

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**